

Judul : Jafar Hafsah Klaim Kembalikan Duit Korupsi E-KTP
Tanggal : Selasa, 17 Oktober 2017
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 8

Jafar Hafsah Klaim Kembalikan Duit Korupsi E-KTP

Mantan Ketua Fraksi Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat, Muhammad Jafar Hafsah, mengaku menerima uang hasil korupsi proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau e-KTP sebesar Rp 970 juta dari bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Bekas anggota Komisi IV DPR itu menerangkan, saat menerimanya, ia sama sekali tak tahu bahwa duit itu berkaitan dengan korupsi proyek senilai Rp 5,84 triliun tersebut. "Saya baru tahu saat diperiksa penyidik KPK," kata Jafar saat bersaksi dalam sidang korupsi e-KTP dengan terdakwa Andi

Agustinus, kemarin.

Jafar mengaku sama sekali tak menaruh curiga bahwa uang yang diterimanya adalah hasil korupsi pengadaan e-KTP. Sebab, saat itu ia bukanlah anggota Komisi II—mitra Kementerian Dalam Negeri, yang menyelenggarakan proyek e-KTP—dan uang diberikan oleh bendahara partainya. Uang itu pun telah ia gunakan untuk keperluan operasionalnya sebagai Ketua Fraksi Demokrat. Misalnya untuk membiayai kunjungan saat terjadi gempa bumi di Mentawai dan pembinaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. "Uang itu sudah saya kembalikan ke KPK," katanya.

Putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang mengadili Irman dan Sugiharto—terdakwa kasus e-KTP yang divonis 7 tahun dan 5 tahun bui—menyatakan ada sejumlah orang dan pihak konsorsium penerima aliran dana korupsi yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu. Di antaranya mantan anggota Komisi II DPR, Miryam S. Haryani dan Markus Nari; bekas Sekretaris Fraksi Golkar, Ade Komarudin; eks Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggraeni; dan belasan pihak konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia, yang memenangi tender proyek e-KTP.

Dari puluhan nama itu, ada 14 orang dan pihak konsorsium yang sudah mengembalikan duit ke KPK. Sebelum Jafar mengembalikan duit yang ia terima, lembaga antirasuah tersebut menerima pengembalian uang dari Diah Anggraeni, Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo, dan pengacara Hotma Sitompoel. Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan belum ada anggota DPR lainnya yang mengembalikan duit korupsi proyek tersebut. Padahal KPK masih membuka pintu kepada siapa saja yang mau bersikap kooperatif untuk mengusut tuntas megakorupsi ini. "Data masih sama," kata dia.

● MAYA AYU | ANDITA RAHMA